

HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM ISLAM

Jaenudin

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

Abstrak

Kepala negara dalam hukum Islam memiliki hak dan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kepala negara baik dilihat dari fungsi dan tujuan negara maupun pandangan para ahli politik Islam seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah dan Muhammad Yusuf Musa, memiliki kesamaan satu dan yang lainnya, yaitu bahwa pada prinsipnya kewajiban kepala negara sangat ditekankan kepada pemeliharaan agama, yaitu terwujudnya syari'ah dalam kehidupan manusia, serta mengatur kehidupan duniawi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kewajiban kepala negara adalah *amanah*, bersikap adil, pengorganisasian jihad dan dakwah, serta melaksanakan musyawarah. Al-Mawardi mengkonsepsikan kewajiban kepala negara dalam teorinya mengenai "sepuluh kewajiban kepala negara", dan Muhammad Yusuf Musa memandang bahwa kewajiban kepala negara yang pertama, yaitu kewajiban menjelaskan dan memelihara agama, dan merupakan kewajiban yang utama. Kewajiban lainnya seorang kepala negara adalah menyebarkan ilmu pengetahuan secara merata, serta mendidik warganya dalam ilmu agama (sebagai *fardu 'ain*) dan umum (sebagai *fardu kifayah*). Di samping kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala negara, ia pun memiliki hak sebagai timbal balik dari kewajiban yang ia laksanakan. Hak-hak tersebut meliputi ketaatan umat (rakyat) kepada kepala negara, dan hak untuk memperoleh biaya hidup untuk diri dan keluarganya dari negara untuk lebih menfokuskan aktivitas kepemimpinannya.

Kata kunci:

Kepala Negara, Hak, kewajiban

A. Pendahuluan

Seorang kepala negara atau khalifah merupakan sebuah posisi yang diamanatkan Allah kepada manusia, fungsi kekhalifahan manusia itu akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada di muka bumi.¹ Fungsi lainnya, adalah bahwa manusia memiliki fungsi sebagai hamba Allah, yang penciptaannya diorientasikan hanya beribadah kepada Allah semata.²

Kedudukan kepala negara atau khalifah merupakan hak dari setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menjabatnya, ia tidak menjadi monopoli sekompok orang, suku, atau pun bangsa tertentu. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa manusia secara keseluruhan memiliki potensi sebagai khalifah, bahkan dalam ayat lain secara khusus al-Quran mengisyaratkan bahwa orang beriman memiliki potensi besar menjabat sebagai khalifah. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Nur: 55, yang artinya sebagai berikut:

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyebah-Ku dengan tiada mempersekutu-

¹ Firman Allah, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Q.S. Al-Baqarah: 30.

² Firman Allah, "Dan tiadalah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku", Q.S. Al-Zariyat: 56. dalam surat lain Allah berfirman, "Dan tiadalah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan ikhlas dan lurus (*hanif*), dan supaya mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat, itulah agama yang benar" Q.S. Al-Bayyinat: 5. penjelasan lebih rinci tentang kedudukan manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dapat lihat: Abd. Muim Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994), hlm. 110-122 dan 149-157.

kan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kepala negara atau khalifah merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai Kepala negara bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan Syari'at-Nya serta membimbingnya ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentinganannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia ke arah kehidupan mulia dan terhormat.

Sekalipun demikian, seorang khalifah tetap merupakan salah seorang dari warga itu sendiri, tetapi ia dipercayai untuk mengurus agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu, ia merupakan orang yang paling banyak tanggung jawab dan bebannya. Disamping itu pula, seorang khalifah atau kepala negara bertanggung jawab langsung kepada Allah, juga bertanggung jawab kepada umat yang telah mendelegasikan kekhalifahan kepada dirinya. Oleh sebab itu, ia tidak dapat semena-mena memerintah orang lain dan beranggapan tak ada lagi kekuasaan yang melebihi dirinya serta merasa sebagai sumber kekuasaan.³

Berdasarkan norma-norma Islam (al-Quran dan Sunnah), kemudian para ahli politik Islam menyusun apa yang menjadi hak dan kewajiban kepala negara. Menurut Muhammad Yusuf Musa, "Setiap hak dimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak bisa menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan cara demikian maka terjalin berbagai hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip yang kuat, adil, dan sehat".⁴

Karena itulah, Islam lebih banyak membicarakan kewajiban daripada hak. Dengan melakukan kewajiban, maka hak akan didapat. Hal ini dapat kita peroleh pengesahannya dalam al-Quran maupun Sunnah. Di antaranya dalam Q.S. Muhammad ayat 7: "Wahai orang-

³ Abul 'Ala Al-Maudidi, *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan. 1995), hlm. 171.

⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi. t.t.), hlm. 137.

orang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Dia akan menolong kamu dan meneguhkan langkahmu”.

Begitu pula dalam Sunnah Nabi yang menganjurkan penunaian kewajiban lebih dahulu, kemudian hak akan datang sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut. Sabda Nabi: “Barangsiapa meringankan beban orang Mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya kelak di akherat”

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa dalam Islam penunaian kewajiban harus lebih dulu diutamakan dibanding dengan pengambilan hak-hak, karena hak-hak seseorang timbul dari kewajiban-kewajiban yang ditunaikan oleh seseorang. Pengambilan hak tanpa penunaian kewajiban bisa jadi digolongkan kepada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Karena seorang kepala negara atau khalifah merupakan seorang yang dipilih umat, maka dia memiliki hak dan kewajiban yang mengiringi tugasnya sebagai kepala negara. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban kepala negara merupakan bagian penting dalam kajian politik Islam, kajian tentang hak dan kewajiban negara ini dapat dilihat dari sudut pandang tujuan dan fungsi negara dan syariat, serta pandangan para ilmuwan politik Islam yang menyoroti kajian ini, seperti al-Mawardi (975-1059), Ibnu Taimiyah (1263-1329), dan Muhammad Yusuf Musa yang menyoroti tentang kewajiban dan hak seorang kepala negara.

B. Kewajiban-Kewajiban Kepala Negara

1. Kewajiban Kepala Negara dari Sudut Tujuan Negara dan Syari'at

Secara umum kewajiban kepala negara tidak bisa lepas dari tujuan dan fungsi dari negara itu sendiri, karena seorang kepala negara memiliki kewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan dari tujuan negara itu. Tujuan negara itu meliputi:

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator;
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;

- c. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar;
- d. Menegakkan keadilan, keadilan ini harus ditegakkan pertama kali oleh kepala negara, serta pejabat-pejabatnya juga harus berbuat adil mengikuti sikap adil yang dilakukan oleh kepala negara, dan terutama penegakkan keadilan ini mesti dilakukan oleh badan-badan pengadilan.⁵

Keempat tujuan dan fungsi negara di atas dapat dikorelasikan dengan kewajiban kepala negara pada umumnya. Meskipun dalam Islam tentunya ada beberapa bagian tambahan yang menjadi kewajiban kepala negara.

Dalam Islam, negara atau *khilafah* memiliki kedudukan bagi pengganti Nabi untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Ibnu Khaldun menjelaskan, khilafah merupakan pertanggungjawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akherat. Karena semua persoalan keduniaan, menurut pandangan agama, bermuara kepada kepentingan akherat. Pada hakikatnya pemegang khilafah (kepala negara) adalah sebagai pengganti Rasul dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

Berdasarkan pandangan tersebut tujuan negara dalam Islam meliputi dua tujuan utama, yang secara langsung juga merupakan tanggung jawab kepala negara dalam merealisasikannya, kedua tujuan tersebut adalah:

Pertama, melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas serta patut, agar seluruh manusia dapat dengan baik melakukan ketaatan kepada Allah; dan *Kedua*, memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, dan mencegah timbulnya kedhaliman.⁶

Menurut Muhammad Yusuf Musa, tujuan utama negara dapat disebut tiga tujuan pokok:

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1992), hlm. 46.

⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm*. hlm. 168.

- a. Memberikan penjelasan keagamaan yang benar dan menghilangkan keragu-raguan terhadap hakikat Islam kepada seluruh manusia, mengajak manusia kepada Islam dengan kasih sayang, melindungi seseorang dari tindakan golongan anti agama dan agresor serta membela syari'at terhadap seseorang yang ingin melanggar hukumnya.
- b. Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap umat sehingga seluruh umat seperti bangunan yang kokoh.
- c. Melindungi tanah air dari segala agresi dan seluruh warga negara dari kezaliman, kedurhakaan dan tirani, memperlakukan seluruhnya sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak, tanpa adanya perbedaan satu dan yang lainnya.⁷ Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Al-Quran surat Al-Anfâl [8] ayat 60 yang artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka (dengan) kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Dalam pandangan Muhammad Asad, tujuan negara bukanlah penjajahan satu bangsa atas bangsa lainnya atau kebudayaan tertentu untuk mengalahkan kebudayaan lainnya, melainkan semata-mata untuk melaksanakan syari'at Islam sebagai satu sistem praktis bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang kepala negara tidak mungkin menerapkan kekuasaannya kecuali pada orang-orang yang mengimami syari'at dan sumber hukum Ilahiah yang berasal dari sisi-Nya, artinya ia seorang Muslim. Sebagaimana halnya bahwa adalah tidak mungkin dapat diwujudkan syari'at Islam yang sempurna dalam arti yang sebenarnya tanpa adanya negara yang sesuai dengan apa yang dituntunkan Islam, maka persis seperti itu pulalah halnya ketidakmungkinan terwujudnya negara menurut Islam sepanjang para penguasanya tidak mau tunduk secara ikhlas kepada peraturan-peraturan Islam.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 169.

⁸ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka. 1985), hlm. 73-74.

Kewajiban kepala negara dalam melaksanakan agama, tidak bisa lepas dari tujuan syari'ah yang paling utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syariat (*maqâshid al-syari'ah*) yang meliputi lima cakupan yang tetap bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang tercakup dalam lima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifẓ al-dîn*), pemeliharaan jiwa (*hifẓ al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifẓ al-al-nasl*), pemeliharaan akal (*hifẓ al-'aql*), dan pemeliharaan harta (*hifẓ al-mâl*). Kemudian terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-Dharûriyat*
- b. *Al-Hâjiyat, Dan*
- c. *Al-Tahsinîyat.*⁹

Kepala negara yang memiliki peran sebagai pengganti Nabi, baik dalam otoritas politik maupun keagamaan, memiliki tanggung jawab menegakkan syari'ah, yang tujuan dari syari'ah itu sendiri adalah kemaslahatan. Penegakkan syari'ah tidak bisa menjadi tanggung jawab individu atau ummat semata, tetapi juga menjadi tang-

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), hlm. 71. Adapun penjelasan dari ketiga konsep maqashid syari'ah tersebut adalah:

(1) *Maqâshid al-dharûriyat* atau tujuan primer merupakan tujuan Syari'at yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akherat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan Syari'at (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

(2) *Maqâshid al-hâjiyat* atau tujuan sekunder ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusiaitu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian, kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum.

(3) *Maqâshid al-tahsinîyat* atau tujuan tertier ialah tujuan syari'at yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang palinglayak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tertier ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang baik atau akhlak karimah. Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995), hlm. 101-102.

gung jawab kepala negara (khalifah) karena Islam tidak mengenal pemisahan antara tanggung jawab politik dan tanggung jawab penegakan agama (syari’ah) secara terpisah.

Tentunya dalam aspek ini, kepala negara memiliki tanggung jawab yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima aspek yang menjadi tujuan syari’ah ini, merupakan hak ummat yang penegakkannya menjadi tanggung jawab kepala negara.

Ibnu Taimiyah, seorang ahli ilmu politik Islam, sangat menekankan bahwa betapa pun bentuk negara dan betapapun cara terbentuknya negara tersebut, ia menghendaki agar syari’ah dijadikan kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Jadi kewajiban-kewajiban seorang kepala negara ditentukan oleh fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan syari’ah. Setiap wilayah di dalam Islam adalah membuat agama untuk Allah semata-mata, inilah tujuan utama negara.¹⁰

Sedangkan menurut Ibn Khaldun, kedudukan raja yang sewajarnya ialah mewujudkan usaha memerintah rakyat sesuai dengan tujuan dan keinginan rakyat yang memerintah. Tindakan politik ialah memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk akal untuk kemajuan kepentingan duniawi dan menjauhkan kejahatan. Kekhalifahan adalah memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk agama, baik untuk soal-soal keakheratan maupun keduniawian, yang bersumber dari soal-soal keakheratan itu, sebab dalam pandangan Pembuat Undang-undang, semua soal keduniaan ini harus dihukumi dari segi kepentingan hidup keakheratan. Oleh karena itu, maka kekhalifahan (*khilafat*) adalah penggantian Pembuat Undang-undang oleh khalifah, sebagai penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi agama.¹¹

Menurut al-Baqilani tugas kepala negara untuk melaksanakan fungsi negara adalah menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, menyingkapkan penindasan, dan meratakan penghasilan negara bagi rakyat. Bagi al-Bagdadi, fungsi negara yang harus dilaksanakan oleh kepala negara adalah melaksa-

¹⁰ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka. 1983), hlm. 257-258

¹¹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Pidaus. 2000), hlm. 234.

nakan undang-undang peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggaran hukum, mengatur militer dan mengelola pajak dan zakat.¹²

Tugas-tugas negara tersebut di atas juga telah dilaksanakan oleh Muhammad saw, beliau telah membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah untuk mencegah konflik-konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban intern, menjamin kebebasan bagi semua golongan, mengatur militer, memimpin peperangan, melaksanakan hukuman bagi pelanggaran hukum, menerima putusan-putusan dari suku-suku yang berada di luar Madinah, mengirim surat-surat kepada para penguasa di Jazirah Arab dan di luar Jazirah, mengadakan perjanjian damai dengan tetangga agar terjamin keamanan ekstern, mengelola pajak dan zakat serta melarang riba di bidang ekonomi dan perdagangan untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, membudayakan musyawarah, menjadi *hakam* (arbiter) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan, dan menunjuk para sahabat untuk menjadi hakim di daerah-daerah luar Madinah serta mendelegasikan tugas-tugas kepada para sahabat.

Tugas yang dilaksanakan oleh Muhammad saw tersebut menunjukkan kesamaan dengan konsep dan teori politik dan kenegaraan tentang tugas kepala negara, dan dengan demikian posisi Muhammad di samping sebagai seorang Rasul juga merupakan seorang kepala negara.

Para ahli seperti C.A. Nallino mengatakan bahwa, “Selama hidupnya Muhammad telah sukses membangun Islam sebagai agama dan sebagai negara secara harmonis dalam waktu yang bersamaan”. Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu’ti Muhammad sepakat bahwa dalam waktu yang bersamaan Muhammad Saw di samping sebagai Rasul dan pemimpin agama, juga adalah sebagai kepala negara. Karena itu, Montgomery Watt menyebut Nabi Muhammad sebagai seorang negarawan dengan menyebutkan empat alasan. *Pertama*, Muhammad saw memiliki bakat sebagai orang yang mampu melihat sesuatu sebelum terjadi karena didukung wahyu dan kejeniusannya. *Kedua*, kearifannya sebagai negarawan ditunjukkannya dalam menerapkan struktur ajaran al-Quran yang global secara kong-

¹² J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994), hlm. 76.

krit melalui kebijaksanaannya yang tepat. *Ketiga*, reformasinya di bidang sosial yang berwawasan jauh yang ditunjang oleh strategi politiknya yang akurat. *Keempat*, Muhammad saw mempunyai kemampuan sebagai administrator dan arif dalam menunjuk para pembantuannya untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi.¹³

Kepemimpinan Muhammad Saw sebagai kepala negara merupakan contoh terbaik dari seorang pemimpin, yang mampu melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan sebaik mungkin, yang hak dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin mampu teraktualisasikan secara sempurna, antara tujuan agama dan duniawi mampu terwujudkan secara maksimal. Ismail R. Al-Faruqi menggambarkan bahwa, “Muhammad memiliki kapasitas (kepemimpinan) sampai tingkatan yang sangat tinggi. Seandainya tak ada Islam, dia tetap merupakan negarawan tercapak yang pernah dimiliki Makkah. Islam menambahkan pandangan-dunia Islam sendiri sebagai tujuan baru, dan memperluas lingkup kepemimpinan kepada umat manusia dan dunia”.¹⁴

Gambaran Muhammad saw sebagai pemimpin besar yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, tampak dalam sikapnya yang mampu berbuat adil dengan tanpa melebihkan satu kepala suku atau kabilah atas yang lainnya, dia selalu hati-hati agar tak menuntut hak istimewa atas dirinya, dan dia selalu memandang dirinya sama seperti yang lain.

Kenabian dan kedudukan Muhammad sebagai pemimpin negara, tidak pernah menghalangi Muhammad untuk memperlakukan orang lain sama kedudukannya. Dialah yang mengajarkan kaum Muslim agar makan di meja yang sama bersama abdi dan budak mereka, memberi pakaian yang sama dengan yang dikenakannya. Ketika suatu hari di pasar, seorang pedagang yang dilindungi oleh Muhammad menarik tangan Muhammad lalu menciumnya. Muhammad menarik balik tangannya seraya berkata, “Inilah yang dilakukan orang Persia terhadap raja mereka. Aku bukanlah raja, dan engkau bukan orang Persia”. Begitu juga, ketika kaum Muslim dikerahkan untuk menggali parit di bagian kota Madinah yang rentan terhadap serang-

¹³ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁴ Ismail R. Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam (Menjelajah Khaanah Peradaban Gemilang)*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 163.

an, untuk dijadikan benteng terhadap serangan pasukan berkuda, Muhammad bersikeras ikut bekerja bersama mereka. Contoh keteladanan Muhammad Saw yang kemudian diikuti oleh para al-Khulafa al-Rasidun, menjadikan sebuah pelajaran agung untuk diikuti oleh seluruh kaum Muslim terutama para pemimpin tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim memimpin.

2. Pandangan Al-Mawardi tentang Kewajiban Kepala Negara

Nama lengkap ilmuwan ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, yang hidup antara tahun 364-450 H/975-1059 M. dia merupakan seorang pemikir Islam terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah, dia mendapat kedudukan terhormat pada pemerintahan Khalifah Al-Qadir.¹⁵

Menurut al-Mawardi, pengangkatan khalifah hukumnya wajib berdasarkan Syari'at, dan bukan berdasarkan akal. Sebab khalifah bertugas mengurus urusan-urusan agama, namun bisa jadi akal tidak mengkategorikan kepemimpinan (*imamah*) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan kepemimpinan (*imamah*) tersebut. Akal hanya menghendaki agar setiap orang dapat melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan bukan pemutusan hubungan, serta bertindak dengan adil dalam pelayanan dan komunikasi. Namun syari'at menghendaki bahwa segala persoalan menyangkut kepemimpinan (*imamah*) harus diserahkan kepada aturan Allah swt. Karena kepala negara (khalifah) disiapkan sebagai pengganti Nabi untuk menjaga agama dan mengatur dunia.¹⁶

Kepala negara yang menurut al-Mawardi sebagai "Penganti Rasul", memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara. Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi meliputi:

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *establish*, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya,

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)* (Jakarta: UI Perss. 1993), hlm. 58.

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah. 2000), hlm. 1-2.

dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.

- b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan antara dua pihak yang berselisish, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang kuat tidak sewenang-wenang, dan orang yang teraniaya (lemah) tidak merasa lemah.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan supremasi hukum (*hudūd*) untuk melindungi larangan-larangan Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan tempat untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia dakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (*ahl ḍ̣immah*), agar hak Allah territorial yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
- g. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau jihad tanpa rasa takut dan paksa.
- h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- j. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi

agama. Tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada umat, dan menipu penasihat. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S. Shâd ayat 26 yang artinya: “Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”. Berdasarkan ayat di atas, Allah tidak hanya memerintahkan pelimpahan tugas, namun lebih dari itu Dia memerintahkan penanganan langsung. Ia tidak mempunyai alasan untuk mengikuti hawa nafsu, jika hal itu ia lakukan, maka ia masuk katagori orang tersesat. Inilah kendati pelimpahan tugas dibenarkan berdasarkan hukum agama dan tugas pemimpin, pelimpahan tugas termasuk hak politik setiap pemimpin.¹⁷

Menurut al-Mawardi, apabila kepala negara atau khalifah telah menunaikan hak umat atau kewajibannya sebagai kepala negara, maka secara otomatis ia telah menunaikan hak Allah. Maka dengan sendirinya pula ia (kepala negara) mempunyai hak atas ummat.¹⁸

Selanjutnya menurut al-Mawardi, bahwa seorang kepala negara atau khalifah harus memundurkan diri dari jabatannya apabila dia mengalami dua kondisi:

- a. Cacat dalam keadilannya. Cacat dalam keadilan ini ada dua: *Pertama*, disebabkan oleh syahwat. *Kedua*, disebabkan syubhat.
- b. Cacat tubuh. Cacat tubuh meliputi tiga faktor: *Pertama*, cacat panca indera. *Kedua*, cacat organ tubuh. Dan *ketiga*, cacat tindakan.¹⁹

Dalam pandangan al-Mawardi, cacat dalam keadilan dan cacat tubuh memaksa seorang kepala negara harus mundur dari jabatannya, disebabkan kedua cacat tersebut dapat mempengaruhi kinerja kepala negara atau khalifah dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara sempurna. Apabila kepala negara tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang merupakan hak umat dan hak Allah, maka secara langsung tidak lagi mempunyai hak menjabat sebagai kepala negara.

¹⁷*Ibid.*, hlm.23-24.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

3. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Kewajiban Kepala Negara

Nama lengkap Ibnu Taimiyah Taqi al-Din Abu Abbas ibn Abdul Halim ibn Abdu al-Salam ibn Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di Harran dekat Damaskus tahun 1262, dan wafat dalam penjara tahun 1328. Ibnu Taimiyah hidup pada masa penyerbuan bangsa Mongol ke dunia Islam, dia dikenal sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang luar biasa, dan dikenal juga sebagai seorang teolog Muslim abad ke-13 dan 14 paling terkemuka.²⁰

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam sedang mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi moral. Seperti diketahui, bahwa kekuasaan pemerintah tidak lagi berada di tangan khalifah yang berkedudukan di Bagdad, melainkan pada penguasa-penguasa wilayah atau daerah, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri yang tinggal di Damaskus hidup berada di bawah kekuasaan Mamluk.

Melihat kondisi tersebut, Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa kebobrokan umat disebabkan oleh kebobrokan para pemimpin dan kurang tepatnya para pemimpin dalam memilih wakil-wakil dan pembantu-pembantunya, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, dia menyajikan suatu contoh atau model pemerintahan menurut Islam berdasarkan keyakinan, bahwa umat hanya mungkin di atur dengan baik oleh pemerintah yang baik. Kemudian Ibnu Taimiyah mendasarkan teori politik pada al-Quran, surat al-Nisa ayat 58-59 yang artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

²⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, terj. Mufid (Jakarta: Rineka Cipta. 1994), hlm. 22.

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Menurut Ibnu Taimiyah ayat yang pertama, yaitu ayat 58 surat al-Nisa, dimaksudkan bagi para pemimpin negara. Demi terciptanya kehidupan bernegara yang serasi hendaknya mereka menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak atasnya, dan bertindak adil dalam mengambil keputusan atas sengketa antara sesama anggota masyarakat. Sedangkan ayat kedua, yakni ayat 59 surat al-Nisa, ditujukan kepada rakyat. Mereka diperintahkan supaya taat, tidak saja kepada Allah dan Rasul, tetapi juga kepada pemimpin mereka, dan melaksanakan segala perintahnya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian kalau terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, maka dalam mencari penyelesaian hendaknya kembali kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunah). Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah, kewajiban kepala negara adalah menyampaikan amanat kepada yang berhak, serta berlaku adil dalam memutuskan perkara.²¹

Manifestasi amanat yang terkandung dalam ayat 58 surat al-Nisa, tersebut akan membawa dua manifestasi: *Pertama*, dalam penunjukkan dan pengangkatan pejabat negara; *Kedua*, dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan serta perlindungan atas harta benda dan hak milik rakyat.

Ibnu Taimiyah menandakan bahwa seorang kepala negara yang memiliki kekuatan dan otoritas tertinggi dalam umat memikul tanggung jawab yang paling berat pula. Seorang kepala negara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan segala kewajiban agama yang merupakan lambang-lambang Islam, seperti berpuasa, melakukan ibadah haji, menghormati hari raya Ied, berzakat, menjalankan sanksi-sanksi hukum (*hudûd wa ta'zir*), meratakan kesejahteraan masyarakat, membela orang-orang yang tertindas, menyempurnakan fungsi pelayanan-pelayanan kemasyarakatan.

Fungsi-fungsi ini memiliki dimensi temporal (duniawi) dan spiritual, karena Allah nanti tidak hanya akan meminta pertanggungjawaban kesejahteraan material rakyat semata, tetapi juga, yang lebih penting, kelurusannya sendiri beserta moral dan agama rakyatnya.

²¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*. 82-83.

Kekuasaan (*wilayah*) merupakan sebuah amanah yang harus diarahkan kepala negara kepada yang berhak.

Menurut Ibnu Taimiyah, seorang kepala negara dapat diibaratkan dengan wali anak yatim, atau pengurus wakaf, yang mampu mengurus dan mengolah harta kekayaan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang yang telah memberikan tanggungannya.²² Selain *amanah*, Ibnu Taimiyah juga menyebutkan keadilan sebagai bagian penting dari tugas kepala negara. Menurutnya, penegakkan keadilan dan amanah merupakan dua buah kualitas esensial bagi pemerintahan Islam.²³

Selanjutnya tanggung jawab kepala negara adalah *jihad*. Pengorganisasian *jihad* merupakan kewajiban bagi seorang kepala negara. Izin untuk berjihad diterima Nabi ketika ia hijrah ke Madinah. Kaum Musliminizinkan untuk berperang membela diri terhadap serangan orang-orang jahiliyah Mekkah (Q.S. al-Baqarah ayat 216). Kewajiban untuk berjihad ini semakin lama semakin ditegaskan oleh al-Quran yang di Madinah. Tujuan jihad adalah agar keseluruhan agama untuk Allah semata-mata dan perintah-Nya sajalah yang harus ditaati umat manusia.

Apabila seorang kepala negara menyatakan perang melawan musuh maka *jihad* merupakan kewajiban masyarakat (*fardh 'ala al-kifayah*); tetapi apabila musuh yang mulai menyerang maka jihad berubah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim (*fardh 'ain*). Di samping itu, Ibnu Taimiyah memandang syi'ar agama (*da'wah*) sebagai tugas pokok dari seorang kepala negara, tetapi ia tidak menggunakan istilah tersebut (yakni istilah *da'wah*) karena orang-orang Khawarij menyebut diri mereka sebagai *ahl al-da'wah*. Sebagai gantinya, ia menggunakan istilah *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Menurutnya, *da'wah* dan *jihad* harus dilaksanakan secara serentak.²⁴

Selanjutnya Ibnu Taimiyah menyebut musyawarah sebagai salah satu yang esensial bagi seorang kepala negara. Di dalam sistem Ibnu Taimiyah, musyawarah ini menjadi perhatian yang khusus. Ia menginginkan adanya musyawarah yang lebih efektif dan lebih luas. Seorang kepala negara di samping menerima pendapat para ulama

²² Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik*. Hlm. 260.

²³ *Ibid.*, hlm. 263.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 267-268.

harus pula menerima pendapat dari semua wakil-wakil rakyat yang otoritatif, dari semua kelas-kelas masyarakat yang berkepentingan, dan dari semua orang yang sanggup memberikan pendapat yang dinamis. Ibnu Taimiyah juga menyarankan agar seorang kepala negara berkonsultasi dengan para ulama yang berpengetahuan dan kejujuran mereka benar-benar meyakinkan.²⁵

4. Pandangan Muhammad Yusuf Musa tentang Kewajiban Kepala Negara

Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya, *Nizâm al-Hukm fi al-Islâm*, menjelaskan bahwa, bila seorang kepala negara telah dipilih, maka segala urusan (pemerintahan) wajib diserahkan kepadanya tanpa dapat dihalang-halangi, kecuali memberi nasehat kepadanya, bila dipandang perlu dan membantunya, serta bila ia meminta. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat menjalankan dengan sepenuhnya segala kepentingan yang dibebankan kepadanya, menangani segala permasalahan umat dan segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.²⁶

Dalam pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban kepala negara, Muhammad Yusuf Musa mengutip pandangan al-Mawardi yang menjelaskan tentang “sepuluh kewajiban kepala negara” yang menjadi landasan pandangannya. Dari “sepuluh kewajiban kepala negara” al-Mawardi, Yusuf Musa menyimpulkan bahwa dari keseluruhan kewajiban yang disebut al-Mawardi dapat disimpulkan mejadi dua bagian utama yang menjadi kewajiban bagi seorang kepala negara. Kedua kewajiban tersebut adalah:

- a. Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan ajarannya kepada seluruh umat manusia.
- b. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun jama'ah (masyarakat) baik ke dalam maupun ke luar.

Muhammad Yusuf Musa memandang bahwa kewajiban kepala negara yang pertama, yaitu kewajiban menjelaskan dan memelihara agama, merupakan kewajiban yang utama. Karena kewajiban ini memiliki fungsi penting pada zaman sekarang sebagaimana pentnignya pada masa Nabi dahulu.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 275-276.

²⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Nizâm al-Hukm*. hlm.138.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa, dahulu bangsa Arab, akidah keagamaannya penuh kebingungan, begitu pula dengan hukum, tradisi, dan prinsip-prinsip hubungan sosial dan akhlaknya. Kemudian Islam datang membawa akidah yang benar, hukum yang adil dan akhlak yang membawa kebaikan bagi individu, masyarakat, umat dan seluruh kemanusiaan. Rasulullah Saw menjelaskan semua hal itu dan para sahabat dan tabi'in mengikuti jalan lurus ini di dalam memelihara dan menjelaskan prinsip-prinsip agama seta meluruskan penyimpangan yang dilakukan orang terhadap hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kewajiban pertama kepala negara adalah kewajiban untuk menjelaskan agama dengan benar dan mengajak umat memegangnya secara teguh serta menyebarkannya kepada umat manusia dengan cara yang baik.

Yusuf Musa menambahkan, disamping apa yang telah disebut di atas, kewajiban lainnya adalah menyebarluarkan ilmu-ilmu dengan segala macam cara. Karena kemajuan umat bergantung kepada tingkat pencapaian ilmu-ilmu agama dan dunianya.²⁷ Penambahan kewajiban kepala negara untuk mengembangkan ilmu agama dan ilmu umum merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan oleh seorang kepala negara, karena melalui penyebaran ilmu-ilmu tingkat peradaban yang tinggi akan dicapai.

Dalam Islam, sebenarnya tidak dijumpai pemilahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, meskipun demikian kewajiban menuntut ilmu-ilmu agama merupakan keawajiban dari setiap orang Muslim (*fardu 'ain*), karena ilmu-ilmu agama diperlukan untuk membimbingnya dalam menjalankan kehidupan beragama sebaik mungkin. Seseorang tidak mungkin dapat melaksanakan perintah-perintah agama tanpa mengetahui ilmu-ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu umum seperti matematika, fisika, kedokteran dan sebagainya merupakan hak bagi setiap warga yang bersifat *fardu kifayah*. Bahkan al-Quran sendiri menegaskan akan penting dan terhormatnya menuntut dan menyebarkan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. Al-Mujâdilah ayat 11.

Dalam sejarah peradaban Islam, kemajuan ilmu pengetahuan pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun (198-

²⁷ *Ibid.*, hlm. 140-141.

218/813-833), seorang khalifah dari Dinasti Abbasiyah. Pada masa ini dicapai berbagai bidang ilmu pengetahuan, di antaranya bidang kedokteran, Hunayn bin Ishaq (w.260/873) diangkat oleh Al-Ma'mun menjadi kepala *Bayt Al-Hikmah* (Rumah Hikmah). Ia bersama kolega dan muridnya diperintahkan untuk mendapatkan dan menerjemahkan seluruh warisan pengetahuan kedokteran dan ilmiah ke dalam bahasa Arab, kedokteran mendapat tempat terhormat sebagai ratu ilmu alam. Pengetahuan agama dan alam merupakan si kembar yang tak terpisahkan, keduanya saling melengkapi dan mendukung. Selain itu, diantara guru Muslim yang paling awal adalah 'Abdullah bin sahl Rabban Al-Thabari (w. 241/855), dan Ya'qub Al-Kindi (w. 260/873), pendiri filsafat Hellenisasi Muslim. Khalaf Abul qasim Al-Zahrawi (w. 414/1013) merupakan ahli bedah terkenal di masanya. Abu Bakar Muhammad Al-Razi (w. 311/932) merupakan seorang dokter terbesar dunia di Abad Pertengahan, dia menulis buku *Al-Mujarrabât*, *Al-Thibb Al-Manshûr*, *Al-Thibb Al-Râhânî*, dan karya puncaknya *Al-Hâmî fi Al-Thibb*, sebuah ensiklopedia tentang semua pengetahuan kedokteran pada zamannya. Abu 'Ali Husain Ibn Sina (w. 428/1037) termasyhur sebagai dokter dan filosof, karyanya *Al-Qânûn fi Al-Thibb*. Abul Walid Muhammad bin Rusyd (w. 595/1198) adalah dokter, filosof, dan hakim.

Di bawah perlindungan Islam, farmakologi dipisahkan dari kedokteran dan mendapat status tersendiri sebagai suatu disiplin ilmu dan profesi, tokohnya antara lain Jabir bin Hayyan (w. 193/808), Al-Biruni (w.443/1051). Di bidang fisika ada Ibn Al-Haitsam (w. 431/1039), menulis *Al-Manâẓhir* (Dunia Visual). Bidang matematika ada 'Umar Khayyam (w. 525/1130), Nashir Al-Din Al-Thusi (w. 645/1247) berhasil membuat rumusan tentang jarak yang dinyatakan dengan angka. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi (w. 236/850), ahli matematika yang memperkenalkan sistem simbol yang menunjukkan sembilan angka, dan penemu *shifr* atau nol untuk menunjukkan kosong. Serta di bidang geografi ada Muhammad Al-Mqdisi (w. 493/1101), Abdul Latif Al-Bagdadi (w. 629/1231) dan Ibn Bathuthah (w. 779/1377).

Sedangkan dalam ilmu-ilmu agama lahir tokoh-tokoh terkemuka antara lain Ibnu Jarir Al-Thabari, Imad Al-Din Ibn Katsir (774/1372), Jalaludin Al-Suyuthi (w. 911/1505), Al-Zamakhshari (w. 538/

1143) di bidang al-Quran; Imam Bukhari (w. 256/869) di bidang hadis; Abu Hanifah (w. 150/768) Al-Syafi’i (w. 204/820) di bidang hukum (fiqh); ‘Ali bin Isma’il Al-Asy’ari (w. 322/935) di bidang teologi; Hasan Al-Bashri (109/728), Al-Junayd Al-Bagdadi (w. 298/910), Al-Ghazali (w. 505/1111) di bidang tashawuf; Al-Kindi (w. 251/866), Al-Farabi (w. 339/950), dan Ibn Khaldun (w. 808/1406) di bidang filsafat dan sosiologi.²⁸

Muncul para tokoh ilmuwan baik di bidang agama maupun umum tidak lepas dari dukungan pemerintah, dan hal ini sangat terlihat jelas terutama pada masa Al-Ma’mun yang dengan dukungannya ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan mencapai tingkat kemajuan tertinggi pada masa kejayaan Islam.

Tanggung jawab kepala negara pada saat ini dalam memajukan ilmu pengetahuan tentunya sangat besar sekali tanggung jawabnya, karena tanpa kesungguhan kepala negara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik dan merata untuk seluruh masyarakat, tentunya kehidupan dan budaya masyarakat akan mundur dan terbelakang. Dan Ilmu pengetahuan merupakan syarat untuk kemajuan bagi negara itu sendiri.

C. Hak-Hak Kepala Negara

Apabila kaum Muslimin telah menyetujui seseorang sebagai kepala negara untuk mengurus diri, agama, dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka seorang kepala negara mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya.

Hak-hak ini meliputi ketaatan kepada kepala negara dalam hal-hal yang baik, mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut akal suatu keharusan dan oleh agama lebih dipertegas lagi.²⁹

Al-Maududi menegaskan bahwa hak negara dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat

²⁸ Kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan lebih jauh dapat dilihat dalam Komisi Nasional Mesir untuk Unesco, *Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan*, terj. Ahmad Tafsir (Bandung: Pustaka. 1986).

²⁹ *Ibid.*, hlm.142.

harus ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun, kecuali tentunya jika akan menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan.³⁰ Hal ini kemudian ditegaskan oleh al-Mawardi, bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak umat (yang tercakup dalam “sepuluh kewajiban kepala negara”). Maka, dengan sendirinya seorang kepala mempunyai dua hak atas umat. *Pertama*, taat kepadanya; *Kedua*, menolongnya, selagi kepala negara itu tidak menyimpang dari hal-hal yang telah ditentukan.³¹

1. Ketaatan kepada Kepala Negara

Suatu negara tercipta karena dukungan dan kesetiaan (*mubaya'ah*) dari *ahli al-syawkah*, dan setelah itu berkat pengaruh ahli al-syawkah itu seluruh masyarakat menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara. Sumpah setia ini memaksakan kepatuhan sebagai kewajiban utama kepada warga negara. Sumpah setia ini adalah sebuah ikrar untuk menaati kepala negara selama perintah-perintahnya sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Nabi Muhammad.

Sumpah setia (*bay'ah*) ini mempunyai dua aspek. Di dalam aspeknya yang *pertama* sumpah setia itu merupakan perjanjian di antara seorang Muslim dengan Allah di mana ia secara mutlak, total, dan tanpa syarat menaati Allah. Di dalam aspeknya yang *kedua*, sumpah setia itu adalah perjanjian di antara seorang Muslim dengan pejabat administratif Muslim di dalam masyarakat. Aspek kedua ini sudah seharusnya berlandaskan aspek yang pertama, yaitu bahwa ketaatan tersebut hanya berlaku selama tidak menyebabkan keingkaran (*ma'shiyah*) kepada Allah.³²

Selama ini argumentasi dasar yang menjadi landasan keharusan patuh kepada kepala negara berdasarkan sumber dari al-Quran (surat al-Nisa ayat 59), juga berdasarkan hadits, diantaranya: “Jika seseorang melihat hal-hal yang tak disenanginya di dalam diri rajanya, maka ia harus menahan dirinya karena setiap orang yang menyimpang dari Sultan walaupun dengan jarak sejauh kal dan mati di dalam keadaan yang seperti itu, sesungguhnya matinya itu adalah mati jahiliyah”.

³⁰ Abul 'Ala Al-Maudidi, *Sistem Politik*. hlm. 275.

³¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. hlm. 26.

³² Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik*. hlm. 278.

Sumber normatif tersebut sering kali digunakan sebagai argumentasi ketaatan kepada kepala negara secara total dan teguh tanpa menghiraukan apa pun yang dilakukan oleh penguasa. Namun dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa ketaatan kepada penguasa bukanlah ketaatan yang pasif dan kaku. Menurutnya, ketaatan itu harus disertai dengan kondisi di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat dan di dalam kehidupan bernegara secara gotong royong. Ketaatan kepada penguasa merupakan ketaatan politis yang pada dasarnya merupakan ketaatan yang bersipat kritis, masyarakat tidak pernah kehilangan hak mengeluarkan pendapat mereka dengan adanya ketaatan tersebut.³³

Ketaatan politik dibatasi dengan pertimbangan keadilan dan kebenaran, dan lebih dari itu, perilaku *bay'ah* itu sendiri menunjukkan adanya eksistensi sebuah perjanjian atau ikrar yang berisi sumpah setia rakyat untuk mematuhi penguasa yang berjanji mempertahankan dan menjaga syari'ah. Kesepakatan antara penguasa dan rakyat itu tidak dapat diganggu gugat selama sang penguasa mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

Terakhir sekali nasehat baik yang dihubungkan dengan perintah utama kepada setiap anggota masyarakat untuk menyerukan kebajikan dan memerangi kejahatan (Q.S. Ali Imran: 103 dan Q.S. al-Maidah: 2), untuk berpartisipasi di dalam meningkatkan moral dengan mengemukakan kritik-kritik (nasehat) yang bersahabat. Nasehat yang baik ini dapat diberikan dalam setiap bidang aktivitas pemerintahan di mana seseorang merasa dapat mengemukakan pendapat yang dinamis dan memberikan sumbangsihnya yang berfaedah. Ketaatan dalam konteks seperti inilah merupakan ketaatan yang ideal yang harus diperjuangkan masyarakat secara terus menerus, di mana masyarakat dapat melakukan kontrol kepada penguasanya tanpa mengabaikan hak ketaatan kepadanya.

Adapun mengenai kepala negara yang lalim atau fasik, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan, satu sisi tetap mempertahankan ketaatan sepenuhnya, sisi yang lainnya adalah pilihan untuk tidak taat kepada penguasa yang zalim. Ibnu Taimiyah salah satunya yang berpendapat, bahwa mengingkari imam (kepala negara) hanya boleh

³³ *Ibid.*, hlm. 280

apabila keputusan-keputusannya terang-terangan bertentangan dengan ketetapan yuridis yang tegas di dalam al-Quran atau Sunnah. Ibnu Taimiyah juga membuat perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan, menurutnya, kita boleh mengingkari seorang kepala negara dan menderita hukuman karenanya, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk melawannya, selama ia masih melakukan shalat.³⁴

Lebih jauhnya lagi, Ibnu Taimiyah menjelaskan, bahwa perlawanan terhadap kezaliman atau korupsi pemimpin dapat mengiring pada kezaliman atau kejahatan yang lebih besar karena munculnya perpecahan di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, jika dipastikan bahwa perlawanan terhadap pemerintah zalim dapat menimbulkan pertikaian penduduk, situasi yang dianggapnya tak terhindarkan dalam situasi dengan pemimpin yang didukung kelompok yang berkuasa, maka umat Islam lebih baik mempertahankan apa yang telah dimiliki ketimbang memulai suatu tindakan yang dapat menimbulkan suasana yang lebih buruk.³⁵

Sebaliknya kelompok Khawarij merupakan kelompok yang paling keras sikapnya di dalam hal ini membolehkan menentang kepala negara (khalifah) yang durhaka. Ibnu Hazm pun ketika membicarakan “*amr ma’ruf nahi mukar*”, berpendapat, bahwa wajib menentang imam yang ternyata patut dipecat. Bahkan orang yang bersikap sabar terhadap imam semacam ini telah berbuat dosa, dan membantu kezalimannya.³⁶ Sebuah pandangan yang merangkum dan juga jalan tengah tentang ketaatan kepada imam, dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa. Menurutinya, ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan persoalan ketaatan terhadap kepala negara:

- a. Bahwa kepala negara (khalifah) sebagai pelaksana eksekutif di dalam negara mempunyai hak untuk ditaati oleh semua warga negaranya, tanpa memperdulikan adanya sekelompok atau seseorang yang tidak suka atau tidak setuju terhadap sebagian kebijakannya di dalam menjalankan urusan negara.
- b. Apabila pemerintah mengeluarkan undang-undang atau perintah yang dengan jelas menurut syara’ memuat hal-hal maksiat, maka

³⁴ *Ibid.*, hlm. 285.

³⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam*. hlm. 94.

³⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm*. hlm. 154.

warga negara tidak ada kewajiban taat dan mendengarkan undang-undang dan perintah semaan itu.

- c. Apabila pemerintah bersikap terang-terangan melawan nash-nash al-Quran, maka sikap semacam ini dinilai sebagai kekufuran terang-terangan. Dan perbuatan semacam ini merupakan alasan pencabutan kekuasaan dari tangannya serta memecatnya.
- d. Pencabutan kekuasaan dari tangan pemerintah tidak dapat dilakukan dengan revolusi bersenjata oleh golongan mioritas dari umat.³⁷

2. Biaya Hidup untuk Kepala Negara

Menurut Yusuf Musa, seorang khalifah harus dicukupi kebutuhannya oleh umat secara wajar bagi diri dan keluarganya, selama ia sepuh waktunya mengurus kepentingan umat dan mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata untuk umat.³⁸

Pandangan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sah mengenai apa yang pernah terjadi pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khaththab. Semasa menjabat khalifah, Abu bakar memperoleh belanja bagi diri dan keluarganya dari kas negara (*baitul mal*). Begitu pula ketika Umar menjabat khalifah, atas usulan Ali ibn Abi Thalib, memperoleh biaya hidup dari negara sekedar cukup untuk diri dan keluarganya.

Dasar dari pemberlakuan prinsip ini oleh kaum Muslimin, adalah agar seorang kepala negara (khalifah) dapat berbakti sepenuhnya kepada umat dan menangani kebutuhan mereka, tanpa terganggu dengan pencarian nafkah hidup, sehingga dengan penuh konsentrasi ia dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kemulian dan kebesaran umat. *Wallahu a'lam bis shawab*.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu: bahwa kewajiban kepala negara dalam melaksanakan agama, tidak bisa lepas dari tujuan syri'ah yang paling utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syariat (*maqâshid al-syari'ah*) yang meliputi lima cakupan yang tetap bermuara kepada

³⁷ *Ibid.*, hlm. 164.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

terwujudnya kemaslahatan. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang tercakup dalam lima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifẓ al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*hifẓ al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifẓ al-al-nasl*), pemeliharaan akal (*hifẓ al-‘aql*), dan pemeliharaan harta (*hifẓ al-mâl*). Kemudian terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Al-Dhar’iyyat*, *Al-Hâjiyyat*, dan *Al-Tabsiniyyat*. Kemudian Hak-hak kepala negara meliputi ketaatan kepada kepala negara dalam hal-hal yang baik, mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Selain itu, berhak dicukupi kebutuhan hidupnya oleh umat secara wajar bagi diri dan keluarganya, selama ia sepenuh waktunya mengurus kepentingan umat dan mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata untuk umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maudidi, Abul ‘Ala. 1995. *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan,
- Al-Mawardi. 2000. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah.
- Asad, Muhammad. 1985. *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Budiarjo, Miriam. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Ismail R. Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi. 1998. *Atlas Budaya Islam (Menjelajah Khaanah Peradaban Gemilang)*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan.
- Jindan, Khalid Ibrahim. 1994. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, terj. Mufid. Jakarta: Rineka Cipta
- Khaldun, Ibn. 2000. *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thaha. Jakarta: Pustaka Pidaus.
- Khan, Qamaruddin. 1983. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka.
- Komisi Nasional Mesir untuk Unesco, *Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan*, terj. Ahmad Tafsir, Bandung: Pustaka, 1986.

- Musa, Muhammad Yusuf. *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM-UNISBA.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1994. *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Jakarrta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim, Abd. Muim. 1994. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta: UI Perss.